

**ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR PARIWISATA BERKELANJUTAN  
DI DESA WISATA BAHARI TANGKOLAK**  
**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE TOURISM STANDARDS IN  
TANGKOLAK MARINE TOURISM VILLAGE**

**Arshylla Optiandeetyas Winoto\*, Asep Agus Handaka Suryana**

Program Studi Pariwisata Bahari, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran  
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor,  
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

\*Corresponding author email: [arshylla21001@mail.unpad.ac.id](mailto:arshylla21001@mail.unpad.ac.id)

Submitted: 22 September 2025 / Revised: 25 September 2025 / Accepted: 21 October 2025

<http://doi.org/10.21107/juvenil.v6i4.31825>

**ABSTRAK**

*Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi bahari melimpah, mencakup ekosistem mangrove, terumbu karang, dan keanekaragaman spesies laut yang menjadikannya basis strategis dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Desa Wisata Bahari Tangkolak di Kabupaten Karawang merupakan salah satu destinasi yang diarahkan untuk menjadi model pengembangan wisata bahari berbasis konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Analisis ini difokuskan untuk menganalisis tingkat implementasi standar pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Bahari Tangkolak dengan merujuk pada Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan serta standar Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis kesenjangan antara kondisi aktual dengan regulasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 12 dokumen utama yang dipersyaratkan, hanya dua yang telah tersedia, yaitu struktur organisasi dan mekanisme kotak saran, sementara dokumen penting lain seperti SOP keadaan darurat, analisis daya dukung wisatawan, dan pedoman CHSE belum tersedia. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan dalam tata kelola destinasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Bahari Tangkolak masih berada pada tahap awal sehingga memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan dokumen pendukung secara bertahap. Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya menjadikan sertifikasi CHSE sebagai prioritas, disertai strategi pemberdayaan masyarakat lokal untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Desa Wisata Bahari Tangkolak.*

**Kata Kunci :** Desa Wisata Bahari Tangkolak, Pariwisata Berkelanjutan, Analisis Kesenjangan

**ABSTRACT**

*Indonesia is an archipelagic country with abundant marine resources, including mangrove ecosystems, coral reefs, and a diversity of marine species, making it a strategic base for sustainable tourism development. Tangkolak Marine Tourism Village in Karawang Regency is one destination aimed at becoming a model for marine tourism development based on environmental conservation and local community empowerment. This study aims to analyze the level of implementation of sustainable tourism standards in Tangkolak Marine Tourism Village, referring to Minister of Tourism and Creative Economy Regulation Number 9 of 2021 concerning Guidelines for Sustainable Tourism Destinations and Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) standards. The research method used was descriptive qualitative through observation, interviews, documentation, and gap analysis between actual conditions and regulations. The results showed that of the 12 required key documents, only two were available: the organizational structure and suggestion box mechanism. While other important documents, such as emergency SOPs, tourist carrying capacity analysis, and CHSE guidelines, were not yet available. This condition indicates a significant gap in destination governance. This study concludes that the management of the Tangkolak Marine Tourism Village is still in its early stages, requiring regulatory strengthening, human resource capacity building, and the gradual development of supporting documents. The study's recommendations emphasize the importance of*

*prioritizing CHSE certification, along with local community empowerment strategies, to enhance the competitiveness and sustainability of the Tangkolak Marine Tourism Village.*

**Keywords:** *Tangkolak Marine Tourism Village, Sustainable Tourism, Gap Analysis*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.380 pulau (Badan Informasi Geospasial, 2024). Dengan panjang garis pantai mencapai  $\pm 108.000$  km dan luas perairan 6,4 juta km<sup>2</sup>, 3,36 juta hektar atau 23% dari total hutan mangrove dunia, 51.020 km<sup>2</sup> luas terumbu karang, 580 jenis karang dan lebih dari 3000 spesies ikan yang ditemukan di perairan Indonesia (Kurniawan *et al.*, 2024) menjadikannya salah satu negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Potensi bahari ini tidak hanya berperan penting bagi ekosistem, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui sektor pariwisata. Pariwisata bahari menjadi salah satu motor penggerak ekonomi biru (*blue economy*) yang tengah dicanangkan pemerintah. Konsep ekonomi biru yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi. Oleh sebab itu, pengembangan destinasi wisata bahari menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut (KKP, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan nasional juga semakin menekankan pada pengembangan desa wisata sebagai bagian dari pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan telah memberikan acuan mengenai standar yang harus dipenuhi oleh destinasi wisata. Standar ini mencakup empat dimensi, yaitu keberlanjutan manajemen, keberlanjutan sosial-budaya, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Implementasi pedoman ini diharapkan dapat mendorong desa wisata untuk tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjamin kelestarian budaya dan lingkungan dalam jangka panjang (Kemenparekraf, 2021).

Penerapan program *Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability* (CHSE) merupakan instrumen penting dalam

menjamin kenyamanan sekaligus keamanan wisatawan. Program ini pada awalnya diperkenalkan sebagai respon pemerintah terhadap pandemi COVID-19, namun hingga kini tetap relevan sebagai standar pelayanan pariwisata berkelanjutan. Melalui CHSE, ditekankan empat aspek utama, yaitu kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan yang menjadi prasyarat dasar bagi sebuah destinasi wisata yang aman, berkualitas, dan berdaya saing. Lebih jauh, sertifikasi CHSE juga diposisikan sebagai salah satu syarat penting bagi destinasi wisata untuk memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah serta meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan destinasi (Kemenparekraf, 2020). Dengan demikian, keberadaan CHSE tidak hanya berfungsi sebagai standar teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung transformasi pariwisata Indonesia menuju arah yang lebih berkelanjutan.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah pesisir di Jawa Barat yang memiliki potensi sumber daya bahari yang cukup besar, terutama adalah ekosistem mangrove, perikanan tangkap, dan wisata berbasis pesisir. Salah satu desa wisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dengan pendekatan berkelanjutan adalah Desa Wisata Bahari Tangkolak yang berada di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Desa ini dikenal dengan ekosistem mangrove yang masih asri, panorama pantai, kegiatan wisata edukatif seperti penanaman mangrove, hingga atraksi budaya lokal masyarakat pesisir. Pemerintah Kabupaten Karawang bahkan mencanangkan Tangkolak sebagai destinasi wisata bahari terintegrasi yang menggabungkan atraksi alam, wisata edukasi, hingga potensi *underwater heritage* (BMKT). Dukungan infrastruktur seperti perbaikan jalan akses, pembangunan saung, serta penyediaan pusat edukasi bahari juga mulai diarahkan untuk menunjang pengembangan destinasi ini (Pemekab Karawang, 2022).

Meskipun telah diterbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip keberlanjutan di tingkat destinasi masih menghadapi tantangan. Sebagian besar

destinasi wisata di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi indikator pariwisata berkelanjutan karena keterbatasan infrastruktur, tata Kelola, serta kapasitas sumber daya manusia. Hal serupa ditegaskan oleh Wijayanti dan Rahmawati (2021) yang menemukan kebijakan pariwisata berkelanjutan seringkali belum diintegrasikan secara efektif ke dalam praktik pengelolaan destinasi, sehingga terjadi kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks global, UNWTO (2019) juga menyoroti bahwa banyak destinasi di negara berkembang menghadapi kendala serupa, di mana standar pariwisata berkelanjutan seringkali hanya diadopsi secara normatif tetapi tidak terimplementasi secara konsisten karena lemahnya monitoring dan keterbatasan sumber daya lokal. Penelitian Bramwell & Lane (2011) menambahkan bahwa terdapat "implementation gap" dalam penerapan pariwisata berkelanjutan, yaitu kondisi ketika kebijakan telah tersedia tetapi tidak sepenuhnya dijalankan di lapangan. Hal ini memperlihatkan bahwa permasalahan ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan merupakan tantangan umum dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, meskipun kerangka regulasi telah tersedia, penerapan standar pariwisata berkelanjutan masih memerlukan strategi adaptasi, penguatan kapasitas, serta sistem monitoring yang lebih efektif agar tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

Secara khusus, pemilihan Desa Tangkolak didasarkan pada posisinya sebagai salah satu desa wisata bahari yang tengah berkembang dengan dukungan pemerintah, tetapi belum banyak dikaji dari perspektif implementasi standar pariwisata berkelanjutan. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada isu kebijakan umum atau studi kasus destinasi populer, sementara kajian mendalam terkait kesenjangan antara regulasi dan praktik di tingkat desa wisata pesisir masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memberikan gambaran empiris mengenai implementasi standar pariwisata berkelanjutan pada skala desa wisata bahari, yang dapat memperkaya literatur akademik sekaligus memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan model pengelolaan destinasi berbasis keberlanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh

mana implementasi standar pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Bahari Tangkolak. Analisis ini difokuskan pada tingkat kesesuaian antara indikator yang ditetapkan dalam regulasi dengan kondisi aktual di lapangan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pengelola desa wisata, pemerintah daerah, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam menyusun strategi pengembangan desa wisata bahari yang lebih adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian berjudul "Analisis Implementasi Standar Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Bahari Tangkolak" tidak hanya relevan dalam ranah akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis yang signifikan dalam mendukung upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

## **MATERI DAN METODE**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2024 di Desa Wisata Bahari Tangkolak, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lokasi penelitian dipilih karena Tangkolak merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai bagian dari program desa wisata bahari berbasis konservasi. Selain memiliki potensi ekosistem mangrove dan aktivitas nelayan tradisional, kawasan ini juga menjadi representasi praktik penerapan standar pariwisata berkelanjutan di tingkat desa wisata bahari.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena sosial secara mendalam, dengan menekankan pemahaman makna dan proses yang dialami oleh subjek penelitian (Creswell, 2014). Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menghasilkan uraian yang faktual, sistematis, dan akurat mengenai realitas sosial, serta menjelaskan hubungan antara regulasi dan praktik di lapangan. Dengan demikian, metode ini relevan untuk menganalisis sejauh mana standar pariwisata berkelanjutan diimplementasikan dalam konteks lokal. Data primer diperoleh dari observasi langsung untuk mengidentifikasi kondisi eksisting terkait penerapan standar pariwisata berkelanjutan,

wawancara mendalam dengan individu yang terlibat langsung di kondisi lapangan untuk memperoleh informasi dan pemahaman, praktik, serta kendala yang dihadapi, dan dokumentasi sebagai bukti visual, catatan kegiatan, dan arsip administratif. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah dan laporan kelembagaan terkait pengembangan desa wisata.

Jumlah informasi dalam penelitian ini sebanyak tiga orang yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Bahari Tangkolak. Informan tersebut meliputi pengelola desa wisata dan perwakilan kelompok masyarakat. Kriteria pemilihan narasumber ditentukan berdasarkan tiga aspek utama (1) memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan pariwisata bahari di Tangkolak; (2) berperan langsung dalam implementasi regulasi atau aktivitas masyarakat; dan (3) mampu memberikan informasi mengenai tantangan, peluang, serta strategi keberlanjutan.

Analisis data dilakukan melalui analisis kesenjangan (*GAP analysis*). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan kondisi aktual penerapan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Bahari Tangkolak dengan standar yang ditetapkan dalam regulasi nasional, khususnya Permenparekraf No 9. Tahun 2021 dan Standar CHSE. GAP analysis dinilai tepat karena mampu mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal dan implementasi nyata, serta menyusun langkah-langkah strategis untuk peningkatan kualitas pengelolaan destinasi wisata (Rangkuti, 2015). Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian literatur. Menurut Denzin, triangulasi merupakan strategi penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas dan reliabilitas data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Standar Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Bahari Tangkolak, Karawang

Analisis implementasi pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Bahari Tangkolak didasarkan pada kerangka empat pilar pariwisata berkelanjutan yang ditetapkan oleh Global Sustainable Tourism Council (GSTC), yaitu (1) Manajemen destinasi, (2) Keberlanjutan sosial – ekonomi, (3) Pelestarian budaya, dan (4)

Keberlanjutan lingkungan. Pilar pilar tersebut juga telah diadopsi dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang menjadi acuan nasional dalam pembangunan dan pengelolaan destinasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pengelola inti wisata Tangkolak, pelaku UMKM lokal, serta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pariwisata, seperti penyewaan perahu dan penyajian kuliner hasil laut. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi eksisting di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Analisis gap ini penting untuk mengetahui sejauh mana implementasi standar pariwisata berkelanjutan telah dijalankan di Tangkolak, sekaligus mengungkap aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai rekomendasi praktis dalam upaya mewujudkan Desa Wisata Bahari Tangkolak sebagai destinasi bahari yang adaptif, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.

### Manajemen Destinasi

Pada kriteria struktur dan kerangka pengelolaan, fokus utama dalam penerapan standar pariwisata berkelanjutan adalah adanya kelembagaan yang jelas, transparan, dan mampu mengakomodasi kepentingan publik, swasta, serta masyarakat sipil. Namun, di Desa Wisata Bahari Tangkolak, struktur kelembagaan pariwisata masih belum terbentuk secara optimal. Belum ada pola kolaborasi formal antara BUMDes Tangkolak Jaya dan Pokdarwis, sehingga kegiatan pariwisata lebih banyak berjalan secara internal pengelola Desa Wisata Bahari Tangkolak. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola di Tangkolak masih bersifat informal dan belum memiliki pembagian peran yang terstruktur, padahal sesuai dengan Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 serta standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC), tata kelola destinasi perlu dikelola melalui organisasi yang memiliki kapasitas manajerial yang kuat dan berkesinambungan.

Pada aspek strategi destinasi berkelanjutan, Tangkolak belum memiliki dokumen rencana jangka panjang (*destination management plan*) yang komprehensif. Perencanaan masih

bersifat sporadis dan belum disusun secara sistematis, baik dari sisi lingkungan, sosial budaya, maupun ekonomi. Perencanaan berbasis masyarakat memang sudah ada, namun belum dituangkan dalam dokumen resmi desa. Ketiadaan strategi tertulis ini menyebabkan arah pengembangan wisata bahari Tangkolak masih bergantung pada kebutuhan jangka pendek dan belum memperhatikan aspek keberlanjutan sebagaimana yang disyaratkan oleh empat pilar standar pariwisata berkelanjutan Kemenparekraf.

Dari sisi promosi, Desa Wisata Bahari Tangkolak juga masih menghadapi keterbatasan. Hingga saat ini, Tangkolak belum memiliki akun media sosial resmi atau saluran promosi digital yang dikelola secara profesional. Aktivitas promosi masih sebatas melalui publikasi lisan (*word of mouth*), dukungan dari pihak eksternal seperti komunitas, serta keterlibatan akademisi dalam kegiatan pendampingan. Hal ini menjadi tantangan karena dalam praktik pengelolaan destinasi modern, keberadaan promosi digital menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya tarik, jangkauan pasar, sekaligus menjaga keberlanjutan destinasi melalui sistem komunikasi yang transparan dan berkelanjutan.

Meskipun kelembagaan formal dan strategi promosi masih terbatas, pola pengelolaan berbasis masyarakat di Tangkolak memiliki keunggulan tersendiri. Aktivitas wisata bahari, seperti tur mangrove, penyewaan perahu nelayan, hingga penyediaan kuliner berbasis hasil laut, dijalankan langsung oleh masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan prinsip *community-based tourism* (CBT), di mana masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam pengelolaan. Model ini dapat memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan destinasi, meskipun dari sisi kelembagaan masih perlu diperkuat agar selaras dengan standar internasional seperti yang ditekankan dalam GSTC.

Ke depan, diperlukan langkah strategis berupa penyusunan struktur kelembagaan destinasi yang jelas, apakah melalui penguatan peran Pokdarwis, integrasi dengan BUMDes, atau pembentukan lembaga khusus pariwisata desa. Selain itu, pengembangan promosi digital resmi juga menjadi kebutuhan mendesak agar Tangkolak dapat bersaing dengan destinasi lain, meningkatkan visibilitas di pasar wisata, sekaligus menarik dukungan lebih luas dari pemerintah maupun mitra eksternal.

Dengan demikian, penguatan struktur pengelolaan destinasi dan sistem promosi resmi menjadi dua aspek prioritas yang perlu segera diwujudkan. Integrasi standar Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 serta kriteria GSTC akan membantu Desa Wisata Bahari Tangkolak tidak hanya meningkatkan tata kelola yang profesional, tetapi juga mewujudkan prinsip keberlanjutan di bidang lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat pesisir.

#### *Keberlanjutan Sosial – Ekonomi* Manfaat ekonomi lokal

Di Desa Wisata Bahari Tangkolak, aktivitas pariwisata bahari telah membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir, meskipun pengelolaannya belum terstruktur secara kelembagaan. Sebagian besar aktivitas wisata, seperti tur mangrove, jasa pemandu wisata, penyediaan hasil laut, hingga penjualan makanan ringan dan minuman oleh UMKM lokal, dijalankan secara langsung oleh masyarakat. Hal ini memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga, meskipun belum ada sistem pemantauan atau pencatatan resmi terkait kontribusinya terhadap perekonomian desa. Berbeda dengan desa wisata lain yang sudah memiliki sistem kelembagaan melalui BUMDes, Tangkolak masih bergantung pada inisiatif individu maupun kelompok kecil. Dampak ekonominya bersifat organik, tidak terukur secara formal, namun tetap memberikan tambahan penghasilan, terutama bagi nelayan, pedagang kecil, dan pelaku usaha rumah tangga.

Keberadaan wisata juga menciptakan peluang usaha baru, seperti penjualan produk hasil laut segar, jajanan lokal, hingga olahan sederhana berbasis mangrove. Meskipun masih berskala kecil, potensi ini dapat diperluas melalui penguatan UMKM, pendampingan usaha, serta integrasi dalam strategi pariwisata desa. Jika mengacu pada Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Usaha Pariwisata Berkelanjutan serta prinsip Global Sustainable Tourism Council (GSTC), aspek manfaat ekonomi lokal di Tangkolak belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terlihat dari ketiadaan sistem distribusi keuntungan, pemantauan ekonomi desa, maupun strategi pemberdayaan UMKM yang terarah. Namun, potensi ini tetap menjadi modal awal yang dapat diperkuat untuk mendukung keberlanjutan ekonomi desa.

#### Manfaat sosial

Aktivitas wisata di Tangkolak juga menghasilkan dampak sosial yang positif.

Masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga ekosistem pesisir, khususnya hutan mangrove yang menjadi daya tarik utama wisata. Nelayan yang sebelumnya hanya fokus pada aktivitas penangkapan ikan kini turut terlibat dalam wisata edukasi mangrove, konservasi, serta jasa pemanduan wisata. Partisipasi masyarakat terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari pengoperasian perahu wisata, pengelolaan stand kuliner hasil laut, hingga kontribusi perempuan desa dalam penyediaan makanan dan minuman bagi wisatawan. Keterlibatan ini menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap destinasi, memperkuat solidaritas sosial, dan memberikan kesempatan kerja alternatif, termasuk bagi generasi muda.

Dari sisi kelembagaan, Tangkolak masih menghadapi keterbatasan. Belum ada mekanisme kontribusi sosial formal, misalnya dana desa dari pariwisata atau sistem pembagian keuntungan untuk pembangunan fasilitas umum. Jika tidak segera diperkuat, kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial antara pihak yang aktif mengelola wisata dan masyarakat lain. Meski begitu, arah pengembangan ini sudah sejalan dengan prinsip *Community-Based Tourism* (CBT) dan standar GSTC, yang menekankan pentingnya pariwisata sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

#### *Pelestarian Budaya*

Pelestarian budaya merupakan aspek penting dalam pengembangan Desa Wisata Bahari Tangkolak, karena budaya tidak hanya mencerminkan identitas masyarakat, tetapi juga dapat menjadi daya tarik wisata yang unik. Upaya menjaga keberlanjutan budaya lokal di Tangkolak berjalan beriringan dengan pengelolaan wisata bahari, sehingga tidak hanya menonjolkan aspek alam, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial masyarakat pesisir.

Di Tangkolak, warisan budaya utama yang masih dijalankan adalah tradisi pesta laut, yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali sebagai bentuk ungkapan syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang diperoleh. Pesta laut ini merupakan salah satu ritual budaya yang sakral dan menjadi momentum kebersamaan masyarakat, di mana seluruh warga terlibat dalam prosesi adat maupun kegiatan pendukungnya. Selain itu, budaya gotong royong juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam membersihkan lingkungan, memperbaiki sarana desa, maupun mendukung kegiatan

wisata. Tradisi gotong royong ini mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas sosial yang kuat di Tangkolak.

Dalam konteks pariwisata, pesta laut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai atraksi wisata budaya yang dapat menarik minat wisatawan sekaligus menjaga keberlangsungan tradisi. Namun, karena perayaannya hanya dilakukan tiga tahun sekali, perlu adanya upaya kreatif agar nilai budaya tersebut tetap bisa dikenalkan kepada wisatawan sepanjang tahun, misalnya melalui dokumentasi, pameran foto, video, atau *storytelling* oleh pemandu lokal.

Hal ini selaras dengan Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 serta prinsip GSTC, yang menekankan pentingnya perlindungan, revitalisasi, dan promosi warisan budaya dalam pariwisata berkelanjutan. Tidak hanya tradisi besar seperti pesta laut, tetapi juga nilai sosial sehari-hari seperti gotong royong perlu ditonjolkan sebagai identitas budaya yang khas. Selain itu, perilaku wisatawan juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan budaya. Melalui edukasi—baik lewat papan informasi, pemandu wisata, maupun kegiatan interaktif—wisatawan dapat diajak untuk memahami nilai pesta laut dan gotong royong sebagai warisan budaya lokal, serta menghormati aturan yang berlaku. Dengan demikian, keberlanjutan budaya di Tangkolak tidak hanya bergantung pada masyarakat lokal sebagai penjaga tradisi, tetapi juga membutuhkan dukungan wisatawan yang menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya tersebut. Langkah ini akan memastikan bahwa pesta laut dan budaya gotong royong tetap hidup, relevan, serta menjadi penguat daya tarik pariwisata bahari berbasis budaya lokal di Desa Wisata Bahari Tangkolak.

#### *Keberlanjutan Lingkungan*

Pada indikator konservasi, pemanfaatan lingkungan dalam pengembangan Desa Wisata Bahari Tangkolak harus mempertimbangkan risiko yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas wisata. Mengingat kawasan Tangkolak didominasi oleh ekosistem hutan mangrove, abrasi pantai, serta perairan pesisir, maka pembangunan pariwisata yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi merusak keseimbangan ekosistem yang justru menjadi daya tarik utama desa. Oleh karena itu, prinsip konservasi harus menjadi fokus utama dalam setiap perencanaan maupun implementasi pengembangan wisata.

Secara ekologis, Tangkolak memiliki potensi besar dalam konservasi mangrove. Secara ekologis, Tangkolak memiliki potensi besar dalam konservasi mangrove. Kawasan seluas sekitar 4 hektare dengan topografi berupa dataran rendah (< 5 mdpl) dan kondisi tanah berlumpur khas ekosistem mangrove menjadi habitat alami berbagai biota pesisir. Hingga saat ini, telah ditanami lebih dari 10.000 pohon mangrove oleh masyarakat bersama mitra eksternal. Analisis vegetasi menunjukkan bahwa jenis dominan yang tumbuh di kawasan ini adalah Api-api (*Avicennia marina*), yang berperan penting dalam menahan abrasi pantai, menjadi tempat pemijahan ikan, dan menjaga kualitas perairan. Keberadaan mangrove ini merupakan potensi utama desa wisata, sekaligus fondasi ekosistem pesisir yang relatif masih alami.

Tujuan konservasi di Tangkolak tidak hanya untuk melindungi kelestarian mangrove sebagai benteng alami pesisir, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan masyarakat nelayan. Sebagaimana ditegaskan oleh Rachman (2020), konservasi bertujuan mempertahankan keberlangsungan sumber daya alam dan ekosistemnya agar tetap mendukung kesejahteraan manusia serta menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Upaya konservasi di Tangkolak tampak pada kegiatan penanaman mangrove secara berkala, baik oleh

masyarakat lokal, komunitas, maupun mitra eksternal. Selain itu, kawasan mangrove dijadikan lokasi wisata edukasi sehingga wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga belajar tentang pentingnya ekosistem pesisir.

### Analisis Kebutuhan Dokumen untuk Pengembangan Desa Wisata Bahari Tangkolak

Analisis kesenjangan (*gap analysis*) dilakukan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara standar yang tercantum dalam pedoman pariwisata berkelanjutan dengan kondisi faktual di Desa Wisata Bahari Tangkolak. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi aspek yang sudah sesuai dengan regulasi, aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi, serta aspek yang sama sekali belum tersedia. Dengan demikian, hasil analisis dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengembangan yang lebih terarah, sistematis, dan berbasis pada kebutuhan aktual di lapangan.

Untuk mengetahui kesiapan Desa Wisata Bahari Tangkolak dalam memenuhi standar ini dilakukan analisis terhadap keberadaan dokumen pendukung yang telah tersedia dan yang masih perlu disusun. Dapat dilihat pada **Tabel 1.** untuk menyajikan kebutuhan dokumen yang dibutuhkan di Desa Wisata Bahari Tangkolak.

**Tabel 1.** Jenis Dokumen yang dibutuhkan Dewi Bahari Tangkolak

| No | Jenis Dokumen                                                                  | Ketersediaan di Desa Wisata Bahari Tangkolak |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Struktur Organisasi                                                            | Tersedia                                     |
| 2  | Buku Ekspedisi                                                                 | Belum Tersedia                               |
| 3  | Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Sampah                                       | Belum Tersedia                               |
| 4  | SOP Keadaan darurat dan manajemen resiko                                       | Belum Tersedia                               |
| 5  | Analisis Daya Dukung Wisatawan                                                 | Belum Tersedia                               |
| 6  | Produk lokal menjadikan kerajinan atau cinderamata                             | Belum Tersedia                               |
| 7  | Kotak Saran, Kotak Keluhan                                                     | Tersedia                                     |
| 8  | CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability)           | Belum Tersedia                               |
| 9  | <i>Do's and Don't's</i> , aturan yang dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan | Belum Tersedia                               |
| 10 | Papan Larangan atau <i>signane</i>                                             | Belum Tersedia                               |
| 11 | SOP tindak lanjut pelanggaran                                                  | Belum Tersedia                               |
| 12 | Paket wisata atau daya tarik wisata                                            | Belum Tersedia                               |

Berdasarkan hasil identifikasi, dari 12 jenis dokumen utama yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021, hanya dua dokumen yang telah tersedia, yaitu struktur organisasi dan kotak saran/keluhan. Kedua dokumen ini menunjukkan adanya kesadaran

awal dalam menyediakan instrumen tata kelola dan mekanisme komunikasi. Namun, sebagian besar dokumen lain, seperti buku ekspedisi, pedoman pengelolaan sampah, SOP keadaan darurat, analisis daya dukung wisatawan, hingga dokumen pendukung CHSE, belum tersedia. Ketiadaan dokumen-dokumen ini

menandakan adanya kesenjangan yang cukup besar antara pedoman pemerintah dengan praktik lapangan. Akibatnya, pengelolaan wisata masih bersifat sporadis dan belum terstandarisasi. Misalnya, tanpa adanya analisis daya dukung wisatawan, aktivitas wisata berisiko melebihi kapasitas lingkungan, sementara absennya SOP keadaan darurat dapat mengurangi kesiapan dalam menghadapi potensi kecelakaan bahari.

Temuan ini dapat dikaitkan dengan teori tata kelola destinasi (destination governance) yang menekankan pentingnya koordinasi, regulasi, partisipasi, dan transparansi dalam pengelolaan destinasi wisata (Bramwell & Lane, 2011). Tata kelola destinasi tidak hanya menyangkut koordinasi antaraktor, tetapi juga penyediaan dokumen dan instrumen formal sebagai landasan hukum dan administratif. Tanpa dokumen tersebut, destinasi sulit mencapai akuntabilitas, keberlanjutan, dan daya saing.

Sebagai pembanding, praktik baik dapat dilihat pada Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta, yang berhasil meraih *ASEAN Community Based Tourism Award*. Salah satu faktor keberhasilan mereka adalah kelengkapan dokumen tata kelola, seperti analisis daya dukung, peraturan lokal pengelolaan lingkungan, serta paket wisata berbasis kearifan lokal. Studi Arida (2017) juga menunjukkan bahwa tata kelola berbasis dokumen yang jelas memperkuat koordinasi antar-stakeholder dan meningkatkan kepercayaan wisatawan. Jika dikaitkan dengan kondisi Tangkolak, ketiadaan dokumen seperti CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*) menjadi kelemahan signifikan. Standar CHSE telah terbukti di berbagai destinasi wisata lain, seperti di Bali dan Lombok, sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan pascapandemi (Putra *et al.*, 2022). Dengan kata lain, penyusunan dokumen CHSE bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga strategi untuk meningkatkan daya saing destinasi pesisir.

Dengan demikian, gap analysis menunjukkan bahwa Desa Wisata Bahari Tangkolak masih berada pada tahap awal dalam tata kelola destinasi. Struktur organisasi dan mekanisme kotak saran menjadi fondasi awal, namun penyusunan dokumen-dokumen lain secara komprehensif harus segera dilakukan. Kelengkapan dokumen ini akan menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan menjadikan Tangkolak sebagai destinasi

wisata bahari yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi standar pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Bahari Tangkolak masih pada tahap awal dan belum sepenuhnya memenuhi indikator Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Manajemen destinasi belum optimal karena lemahnya kelembagaan dan ketiadaan dokumen perencanaan. Aspek sosial-ekonomi memberi manfaat bagi masyarakat, budaya lokal masih terjaga, dan lingkungan memiliki potensi konservasi melalui ekosistem mangrove, namun ketiganya belum dikelola secara sistematis. Secara keseluruhan, tata kelola formal masih terbatas dengan hanya dua dari dua belas dokumen standar yang tersedia. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan atau revitalisasi Pokdarwis atau BUMDes yang transparan dan akuntabel. Penyusunan dokumen tata kelola, termasuk standar CHSE, SOP darurat, pedoman pengelolaan sampah, serta analisis daya dukung, perlu segera dilakukan untuk menjamin keberlanjutan destinasi. Optimalisasi promosi digital dan pengemasan tradisi budaya seperti pesta laut dan gotong royong sebagai atraksi edukatif akan memperkuat identitas lokal. Selain itu, konservasi mangrove harus dilanjutkan dengan monitoring berkelanjutan dan pengembangan wisata edukasi berbasis ekosistem. Dengan langkah tersebut, Desa Wisata Bahari Tangkolak berpotensi berkembang menjadi destinasi bahari yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan proses penyusunan artikel ini. Pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pengelola Desa Wisata Bahari Tangkolak, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah membantu terlaksananya penelitian ini serta memberi dukungan informasi terhadap penelitian ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa



mendatang. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan, serta menjadi rujukan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Informasi Geospasial. 2024. BIG Ungkap Jumlah Pulau di Indonesia Tahun 2024 Capai 17.380. <https://sipulau.big.go.id/news/11>
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315134543>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. Program Destinasi Wisata Bahari. Jakarta
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2020. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2010. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*. Jakarta: Kemenparekraf.
- Kurniawan, Rika; Putra, Risandi; Rahman, Aulia. 2024. *Kondisi Terumbu Karang di Kawasan Konservasi (KK) Bintan-Tambelan, Kepulauan Riau Coral Reef Conditions in the Conservation Area (CA) of Bintan-Tambelan, Riau Islands* Rika Kurniawan 1\* , Risandi Dwirama Putra 2, Jumsurizal 2 , Aulia Rahman 3. 13(1), 24–35.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kabupaten Karawang. (2022). *Statistik Sektoral Kabupaten Karawang 2022*. Karawang: Bappeda Kabupaten Karawang
- Rangkuti, F. (2015). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Saufi, A., O'Brien, D., & Wilkins, H. (2020). Balancing tourism, conservation, and development: A sustainability assessment of Lombok, Indonesia. *Tourism Management Perspectives*, 34, 100664. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100664>
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19<sup>th</sup> ed.). CV Alfabeta.
- UNWTO. (2019). *Sustainable Development of Tourism: Institutional and Governance Frameworks for Sustainable Tourism*. Madrid: World Tourism Organization. <https://www.unwto.org>
- Wijayanti, A., & Rahmawati, F. (2021). Implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan pada destinasi wisata di Indonesia. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 16(2), 87–99. <https://doi.org/10.47608/jki.v16i2>